



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Jalan Yos Sudarso Nomor 18 – 22 Surabaya – 60272
Telp. (031) 5463551 Fax. (031) 5463547

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR : 45 TAHUN 2016

T E N T A N G PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Memperhatikan :

1. Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 180/10032/436.1.2/2015 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Pengajuan Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.
2. Surat Komisi A DPRD Kota Surabaya Nomor 330/Komisi A/XI/16 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa.
3. Surat Komisi B DPRD Kota Surabaya Nomor 66/Komisi B/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 perihal Usulan Raperda Inisiatif.
4. Surat Komisi C DPRD Kota Surabaya Nomor tanggal Nopember 2016 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa.
5. Surat Komisi D DPRD Kota Surabaya Nomor 75/Komisi D/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa.
6. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 22 dan 30 Nopember 2016;
7. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 29 Nopember 2016
8. Rapat Badan Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 30 Nopember 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 dimaksud dalam diktum kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Nopember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

Wakil Ketua



DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	Ket.
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA									
1.	Aplikasi Taxi Online	Aplikasi Taxi Online	V			V		1. Dinas Perhubungan 2. Diskominfo	BPP
2.	Perlindungan Tenaga Kerja lokal Surabaya	Perlindungan Tenaga Kerja lokal Surabaya	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial	BPP
3.	Penyelenggaraan Perijinan	Penyelenggaraan Perijinan	V			V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 2. Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Bappeko 4. Bag. Perekonomian dan Usaha Daerah	Komisi A
4.	Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya	Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya	V			V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 2. Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Bappeko 4. Bag. Perekonomian dan Usaha Daerah	Komisi B
5.	Pengelolaan / Audit Management Energi Perkotaan	Pengelolaan / Audit Management Energi Perkotaan	V			V		1. Inspektorat 2. BKD 3. Bappeko	Komisi C
6.	Pelayanan Tenaga Kerja dan Investasi	Sistim Kesehatan Daerah	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 3. Bappeko 4. Dinas Koperasi dan	Komisi D

								UMKM	
7.	Penataan Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;	Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;		V			V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta karya dan Tata Ruang; 3. Dinas PU. Bina Marga dan Pematusan 4. Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah 5. Bag. Hukum 	
8.	Penerapan Sistem Pajak Online terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;	Online sistem dan transaksi usaha dan pelaporan serta pembayaran pajak secara online		V			V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Kebudayaan dan pariwisata 3. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Bag. Bina Program. 6. Bag. Hukum. 	
9.	Kompensasi Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar;	Pengelolaan dan Kompensasi dampak Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar		V			V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah 4. Dinas PU. Bina Marga dan Pematusan; 5. Bag. Hukum; 6. Bag. Bina Program 7. Bag. Perlengkapan 	
10.	Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.	Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir .		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP No. 97 Tahun 		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 	

					2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			3. Dinas Perhubungan; 4. Bag. Hukum.	
11.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)		V		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bag. Bina Program; 5. Bag. Hukum	
12.	Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah Kota Surabaya	Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah Kota Surabaya		V	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	1. Inspektorat 2. Bag. Hukum 3. Bag. Pemerintahan 4. Satpol PP 5. Bakesbangpol Linmas 6. BKD 7. Bag. Ortala 8. Sekretaris DPRD	
13.	Ijin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	Ijin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing		V				1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Sosial	
14.	Tempat Hunian Berimbang	dan Tempat Hunian Berimbang		V				1. Dinas PU Cipta Karya dan tata ruang 2. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah	
15.	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan		V				1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan	

								dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bag. Hukum.	
16.	Perlindungan Makanan	Perlindungan Makanan		V		V		1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial	
17.	Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUM-RW) dan Pasar Uang Intern Badan Usaha Milik Warga (PUIBUM-RW)	Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUM-RW) dan Pasar Uang Intern Badan Usaha Milik Warga (PUIBUM-RW)		V		V		1. Bappeko 2. Bag. Perekonomian dan Usaha Daerah 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
18.	Pelayanan Pembinaan dibidang Ketenagakerjaan	Pelayanan Pembinaan dibidang Ketenagakerjaan		V	1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP. Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 7. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	
19.	Upaya Kesehatan Daerah	Upaya Kesehatan Daerah		V	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	
20.	Izin Mendirikan Reklame	Izin Mendirikan		V	Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah	V		1. Dinas PU. Cipta	

	dan Pajak Reklame	Reklame dan Pajak Reklame			dan Retribusi Daerah			Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017									
21.	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	V		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.	V		1. Dinas Perhubungan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Badan Perencanaan Pembangunan.	

22.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	V	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V	V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
23.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Penambahan Kawasan Tanpa Rokok yang semula 5 (lima) kawasan menjadi 7 (tujuh) kawasan		V	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok		V	1. Dinas Kesehatan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
24.	Surat Izin Perumahan	Tata cara Penerbitan Surat Izin Perumahan	V		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
25.	Izin Pemakaian Bangunan	Tata Cara Penerbitan Izin Pemakaian Bangunan	V		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
26.	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;

27.	Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	
28.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
29.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	V		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	

30.	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal. 	
31.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	V			V	V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
32.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V		V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya; 	
33.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	V			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada 	

34.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V			V		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
35.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
36.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
37.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V			V	5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; Dinas Kebersihan dan Pertamanan

38.	Bangunan	Tata Cara Pendirian Bangunan di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 	
39.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Penyesuaian nilai tarif retribusi		V	Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 	
40	Penyelenggaraan Reklame	Tata cara penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya	V				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 	
41.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penyesuaian tarif retribusi		V	Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 	

42.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. 	
43.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V	V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 4. Bagian Bina Program. 	

44.	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
45.	Perkoperasian	Perkoperasian di Kota Surabaya			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
46.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika.
47.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama	Perubahan ketentuan perizinan menara telekomunikasi bersama		V	Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menmbatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika.

					Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
48.	Penyelenggaraan Warung Internet dan Game Online	Penyelenggaraan Warung Internet dan Game Online di Kota Surabaya	V		Kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Satuan Polisi Pamong Praja. 	
49.	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya	Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Bagian Perlengkapan 	
50.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 	
51.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota	Penyesuaian materi Raperda dengan		V	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 	

	Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya			tentang Cagar Budaya			2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
52.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
53.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan		V	Risalah Rapat Terbatas No. R-57/Seskab/DKK/3/2016 Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan		V	Badan Lingkungan Hidup	
54.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan		V	Risalah Rapat Terbatas No. R-57/Seskab/DKK/3/2016 Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan		V	Badan Lingkungan Hidup	

55.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya	Perubahan sebagian materi Peraturan Daerah antara lain mengenai Sanksi Pidana		V			V	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
56.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penambahan subtransi tentang Pengelolaan Krematorium di Kota Surabaya		V			V	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
57.	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan
58.	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	V		Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan; 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

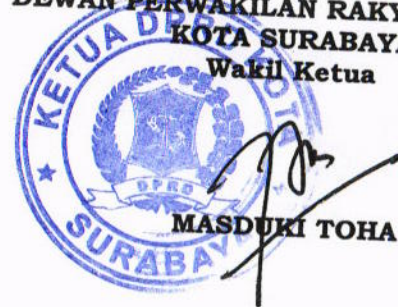
C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

59	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah								
60	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah								
61	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah								
62.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung 2 Rancangan Peraturan Daerah akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur 3 Rancangan Peraturan Daerah akibat perintah dari peraturan perundang- 								

	undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

SURABAYA, 30 Nopember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
Wakil Ketua



MASDUKI TOHA